

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai Implementasi Pelayanan Program Keluarga Harapan Di Bidang Pendidikan dan Kesehatan Pada Kawasan Pesisir Kota Bandar Lampung (studi di Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Teluk Betung Selatan), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Pelayanan Program Keluarga Harapan Di Bidang Pendidikan dan Kesehatan Pada Kawasan Pesisir Di Kelurahan Bumi Waras Kota Bandar Lampung yang memfokuskan pada:
 - a. Sosialisasi program di Kelurahan Bumi Waras, masih ditemui banyak warga yang tergolong kategori keluarga sangat miskin tidak mendapatkan sosialisasi PKH sehingga tidak semua keluarga mengetahui tentang kebijakan PKH yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
 - b. Hasil penelitian pada pelayanan PKH di bidang pendidikan menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) membuat anak peserta Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi disiplin dalam bersekolah sehingga mereka memperoleh pendidikan yang layak. Selain itu, dalam PKH terkandung berbagai kepentingan baik dari tim PKH, peserta PKH sendiri, kepentingan Ketua RT untuk keluarganya, serta

kepentingan terselubung dari petugas Kelurahan. Di bidang pendidikan ini, PKH dibantu oleh guru dan kepala sekolah, dimana mereka diberikan form verifikasi pendidikan yang menunjukkan apakah anak tersebut suka membolos atau tidak, serta apakah benar anak tersebut benar bersekolah di tempat yang dikatakan oleh peserta PKH. Dalam pelaksanaan PKH di Kelurahan Bumi Waras tersebut, Tim Pendamping memiliki wewenang untuk mengambil keputusan karena berhubungan langsung dengan masyarakat.

- c. Pelaksanaan Pelayanan Program Keluarga Harapan (PKH) di bidang kesehatan telah berjalan dengan baik, dimana ibu hamil, anak bayi, dan balita memiliki jaminan mendapat asupan gizi yang cukup melalui pemeriksaan rutin yakni pemberian vitamin, imunisasi, serta penimbangan berat badan rutin di Posyandu. Pelaksanaan Pelayanan PKH bidang kesehatan ini turut melibatkan tim Dinas Kesehatan, dokter, serta bidan untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada peserta PKH tersebut. Selain itu, letak pengambilan keputusan utama Program Keluarga Harapan ini terletak pada Kementerian Sosial. Di Kelurahan Bumi Waras sendiri letak pengambilan keputusan ada pada pendamping, apakah peserta PKH masih layak atau tidak menerima bantuan PKH di bidang kesehatan ini. Hal itu karena pendamping mengetahui dengan pasti bagaimana keadaan peserta PKH.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam kebijakan Program Keluarga Harapan adalah sebagai berikut:
 - a. Sosialisasi PKH dinilai tidak merata, hal itu karena tidak semua pihak memahami Program Keluarga Harapan.
 - b. Kendala pendataan peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Data penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dinilai tidak valid karena data yang digunakan adalah data tahun 2008.
 - c. Kurangnya koordinasi Tim Pendamping dengan pihak Lurah dan Ketua RT setempat.

6.2 Saran

Ada beberapa hal yang semestinya dibenahi agar pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) kedepannya dapat berjalan dengan baik, yakni:

1. Terkait dengan permasalahan sosialisasi.

Tim UPPKH (Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan) sebaiknya dapat turun langsung untuk menyosialisasikan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada warga Kelurahan Bumi Waras dengan cara menyebarluaskan brosur PKH, agar warga mengerti apa itu Program Keluarga Harapan (PKH) serta sasarannya, sehingga warga tidak menjadi salah paham.
2. Terkait dengan pendataan

Pendataan sebaiknya menggunakan data yang *up to date* dengan melakukan pendataan ulang terhadap warga yang tergolong sebagai keluarga sangat miskin melalui kerja sama dengan pihak Kelurahan

untuk memperoleh data terbaru warga Kelurahan Bumi Waras, karena data dinilai tidak valid apabila berpegang melalui data tahun 2008.

3. Terkait dengan koordinasi

Koordinasi yang baik antar *stakeholder* sangat berpengaruh terhadap berhasilnya pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), jadi tidak terkesan hanya pihak Kemensos dan UPPKH (Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan) saja yang merupakan pelaksana PKH ini. Tim UPPKH, terutama Pendamping sebaiknya dapat menjalin koordinasi yang baik dengan Lurah dan Ketua RT, agar mereka juga dapat menengahi keluhan warga terkait dengan PKH ini.